

Laporan Koalisi P4G Getting to Zero Coalition terbaru: Indonesia sebagai pusat transisi energi global pelayaran

TAJUK UTAMA

Diterbitkan hari ini, laporan terbaru dari Koalisi P4G-Getting to Zero berjudul “Shipping Energy Transition: Strategic Opportunities in Indonesia” (“Transisi Energi Perkapalan: Peluang Strategis di Indonesia”) mengeksplorasi potensi Indonesia untuk mempercepat dan memanfaatkan dekarbonisasi maritim internasional. Laporan ini menemukan bahwa Indonesia memiliki beberapa peluang untuk memanfaatkan transisi global ke bahan bakar maritim niremisi dalam pencapaian tujuan utama nasional. Namun, mencapai hal ini memerlukan tindakan yang terarah untuk membuka peluang-peluang tersebut.

Pelayaran internasional menyumbang sekitar 3% dari emisi Gas Rumah Kaca (GRK) global, yang akan meningkat dalam skenario business-as-usual. Untuk mendekarbonisasi industri maritim, akan ada kebutuhan besar akan bahan bakar hijau dan teknologi terkait. Secara khusus, bahan bakar niremisi skalabel (Scalable Zero Emissions Fuel – SZE) seperti hidrogen hijau dan amonia hijau dianggap sebagai bahan bakar yang paling menjanjikan untuk transisi energi pelayaran.

“Meningkatnya momentum di balik dekarbonisasi maritim internasional memiliki potensi besar bagi negara-negara seperti Indonesia. Untuk lebih menyadari peluang ini dan memberi sinyal dukungan publik yang kuat, Indonesia harus berupaya memanfaatkan pengaruhnya dalam negosiasi internasional, terutama memanfaatkan perannya sebagai tuan rumah G20 akhir tahun ini, di samping negosiasi COP27 dan IMO yang akan datang,” ujar Ingrid Sidenvall Jegou, Program Director di Global Maritime Forum.

Dengan lebih dari 17.000 pulau, Indonesia secara intrinsik terikat dengan industri maritim, dengan banyaknya kapal kecil yang menjadi armada domestik, serta volume lalu lintas internasional tinggi yang melewati perairan Indonesia. Kegiatan maritim berkontribusi besar bagi masyarakat dan perekonomian Indonesia, terdapat potensi yang kuat untuk memanfaatkan kegiatan ini untuk dekarbonisasi kegiatan industri lainnya dan mendukung pembangunan ekonomi yang lebih luas.

“Mengidentifikasi peluang strategis untuk produksi energi terbarukan di negara berkembang dan berkembang, seperti Indonesia, sangat penting untuk memungkinkan transisi yang adil & merata untuk pelayaran internasional. Dengan meningkatkan potensi energi terbarukan, Indonesia dapat mendekarbonisasi industri dalam negeri dan membantu transisi energi perkapalan lebih luas - jalur yang memungkinkan Indonesia menjadi produsen dan pemasok terkemuka bahan bakar niremisi berkelanjutan, menciptakan lapangan kerja baru yang berkelanjutan, dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi,” ujar Margi Van Gogh, Head, Supply Chain and Transport di World Economic Forum.

Dengan membangun hub ramah lingkungan, Indonesia dapat memperkuat posisinya sebagai poros maritim utama, menciptakan aliran pendapatan baru dari ekspor dan bunkering SZE, serta meningkatkan akses ke pasar impor dan ekspor.

Pengembangan infrastruktur bahan bakar tanpa emisi yang terukur dapat menghasilkan investasi antara Rp 46 – 65 triliun IDR (\$ 3,2-4,5 miliar USD) pada tahun 2030. Potensi ini di luar potensi pengembangan industri lain, keahlian, manfaat perlindungan lingkungan dan R&D yang berasal dari dekarbonisasi pelayaran maritim dan adopsi SZE.

Setelah konsultasi ekstensif dengan pemangku kepentingan utama di Indonesia, laporan tersebut mengidentifikasi tiga peluang utama, termasuk kemungkinan menetapkan Kalimantan sebagai

pusat bunkering, elektrifikasi armada kapal kecil, dan pusat dekarbonisasi yang ditenagai oleh kegiatan panas bumi.

“Dekarbonisasi maritim di Indonesia memberikan beberapa peluang bisnis yang menarik, seperti elektrifikasi armada kapal kecil, produksi dalam negeri bahan bakar maritim nol-emisi, dan sinergi dengan proyek infrastruktur darat skala besar. Dalam semua kasus, meningkatkan peningkatan kapasitas dan transfer teknologi akan menjadi hal terpenting dalam mewujudkan peluang ini secara maksimal,” ujar **Dr. Domagoj Baresic, Research Associate di UCL Energy Institute.**

Akan tetapi, hal yang penting dalam membuka peluang ini adalah kebijakan yang fasilitatif dan kerangka finansial yang mampu secara efektif memotivasi dan mempertemukan para pelaku kunci di seluruh sektor dan rantai nilai. Saat ini, Indonesia mendapat manfaat dari kerangka kebijakan yang ada di bidang maritim, energi dan iklim, namun diperlukan upaya yang besar untuk mengoordinasikan kebijakan secara khusus seputar peluang dekarbonisasi maritim.

Indonesia juga diuntungkan dari keberhasilan yang telah ada dan ambisi kedepan terkait penerimaan pendanaan dari sumber internasional. Hal ini sangat dibutuhkan untuk mendukung upaya dekarbonisasi yang ada di Indonesia dalam hubungannya dengan kebutuhan pembangunannya. Menetapkan arah yang jelas dan meyakinkan dukungan publik akan meningkatkan kemampuan Indonesia untuk menarik sumber pendanaan ini.

“Mendukung keselarasan Strategi GRK IMO dengan sasaran Perjanjian Paris, Pemerintah Indonesia perlu melakukan kajian komprehensif terhadap dampak dan strategi dekarbonisasi pelayaran. Hal ini dapat membantu memposisikan Pemerintah Indonesia dalam negosiasi IMO berikutnya dan berfungsi sebagai basis bukti untuk mendukung penerapan langkah-langkah GRK yang lebih ambisius, yang mengoperasionalkan prinsip common but differentiated responsibilities and respective capabilities,” ujar **Dr. Mas Achmad Santosa, CEO di Indonesia Ocean Justice Initiative.**

Ketika negara-negara lain mengambil langkah untuk meningkatkan upaya mereka dan mulai membuka peluang ini, Indonesia harus mengambil tindakan cepat dan strategis untuk memposisikan diri sebagai pemain kunci di area ini.

“Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia bergantung pada transportasi laut untuk pergerakan barang dan orang yang berkontribusi terhadap emisi maritim domestik secara signifikan. Laporan ini menguraikan langkah-langkah kunci yang dapat diambil Indonesia untuk memanfaatkan potensi energi terbarukan dan mendekarbonisasi industri maritim lokalnya. Dengan menciptakan lapangan kerja dan memberikan manfaat lingkungan di seluruh sektor, pendekatan ini dapat menjadi contoh bagi negara berkembang lainnya yang beralih ke ekonomi rendah karbon,” ujar **Ian de Cruz, Global Director di P4G.**

Unduh laporan selengkapnya [di sini](#).

Informasi lebih lanjut: Project Lead, Katrina Abhold di ka@globalmaritimeforum.org atau +45 3118 3329

Tentang Laporan

Laporan P4G *“Shipping’s Energy Transition: Strategic Opportunities in Indonesia”* disusun oleh Koalisi P4G-Getting to Zero Partnership.

Koalisi P4G-Getting to Zero Partnership, dilaksanakan bersama oleh Global Maritime Forum, World Economic Forum, Friends of Ocean Action, Environmental Defense Fund, University College London dan International Association of Ports and Harbors, memanfaatkan platform P4G untuk melibatkan pemangku kepentingan dan pihak swasta dari tiga negara mitra P4G: Indonesia, Meksiko, dan Afrika Selatan. Tujuannya adalah untuk mewujudkan kapal dan bahan bakar niremisi serta mengidentifikasi pertumbuhan dan peluang bisnis yang nyata dan dapat ditindaklanjuti yang dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan inklusif di negara-negara yang ditargetkan.

Tentang Koalisi 'Getting to Zero Coalition'

Koalisi "Getting to Zero Coalition" (GtZ), kemitraan antara Global Maritime Forum dan World Economic Forum, adalah komunitas pemangku kepentingan lintas sektor maritim, energi, infrastruktur, dan keuangan, dan didukung oleh pemerintah utama, organisasi pemerintah internasional (IGO), dan pemangku kepentingan lainnya, yang berambisi dan berkomitmen untuk dekarbonisasi sektor pelayaran.

Ambisi dari Getting to Zero Coalition adalah untuk mewujudkan Wahana Niremisi (Zero Emission Vehicle—ZEV) yang layak secara komersial yang beroperasi sepanjang rute perdagangan laut pada 2030, dengan didukung oleh infrastruktur yang diperlukan untuk menyediakan sumber energi niremisi yang skalabel, termasuk produksi, distribusi, penyimpanan, dan bunkering, menuju dekarbonisasi penuh pada 2050.

Tentang Partnering for Green Growth and the Global Goals 2030

Partnering for Green Growth and the Global Goals 2030 (P4G) adalah mekanisme penyelenggaraan global yang memelopori kemitraan hijau untuk membangun ekonomi berkelanjutan dan tangguh. P4G memobilisasi ekosistem global dari 12 negara mitra dan 5 mitra organisasi untuk membuka peluang bagi lebih dari 66 kemitraan yang bekerja di lima bidang SDG: pangan dan pertanian, air, energi, kota, dan ekonomi sirkular.

Tentang Global Maritime Forum

Global Maritime Forum (GMF) adalah organisasi nirlaba internasional yang didedikasikan untuk membentuk masa depan perdagangan lintas laut global guna meningkatkan pembangunan ekonomi jangka panjang yang berkelanjutan dan kesejahteraan manusia.

Tentang World Economic Forum

World Economic Forum (WEF) adalah Organisasi Internasional untuk Kerja Sama Pemerintah-Swasta. Forum ini melibatkan para pemimpin politik, bisnis, budaya, dan masyarakat terkemuka lainnya untuk membentuk agenda global, regional, dan industri. Didirikan pada 1971 sebagai yayasan nirlaba dan berkantor pusat di Jenewa, Swiss, organisasi ini independen, tidak memihak dan tidak terikat pada kepentingan khusus apa pun.

Tentang Friends of Ocean Action

Friends of Ocean Action adalah sebuah kelompok unik beranggotakan lebih dari 55 pemimpin global dari bisnis, organisasi internasional, masyarakat sipil, sains, dan akademisi yang tengah mengupayakan percepatan solusi skalabel untuk menjawab tantangan paling mendesak yang dihadapi lautan. Kelompok ini diselenggarakan oleh World Economic Forum bekerja sama dengan World Resources Institute.

Tentang Environmental Defense Fund

Environmental Defense Fund Europe adalah afiliasi dari Environmental Defense Fund (EDF), sebuah organisasi nirlaba internasional terkemuka yang menciptakan solusi transformatif untuk masalah lingkungan yang paling serius. Sejak 1967, EDF telah menggunakan sains, ekonomi, hukum, dan kemitraan sektor swasta yang inovatif untuk menghadirkan suara baru bagi solusi praktis.

Tentang University College London

University College London (UCL) Energy Institute Shipping Group bertujuan untuk mempercepat transisi pelayaran ke sistem energi yang adil dan berkelanjutan secara global melalui penelitian, pendidikan, dan dukungan kebijakan pelayaran kelas dunia. Kelompok ini mengkhususkan diri dalam penelitian multi-disiplin berdasarkan analisis data dan pemodelan terdepan sektor maritim.

Tentang International Association of Ports and Harbours

International Association of Ports and Harbours (IAPH) dibentuk pada 1955 dan selama enam puluh tahun terakhir telah berkembang menjadi aliansi global yang mewakili lebih dari 180 pelabuhan anggota dan 140 bisnis terkait pelabuhan di 90 negara. Tujuan utama IAPH berkisar pada promosi kepentingan pelabuhan di seluruh dunia, membangun hubungan anggota yang kuat dan berbagi praktik terbaik di antara anggotanya.

Tentang UMAS

UMAS memberikan layanan konsultasi dan melakukan penelitian untuk berbagai klien di sektor publik dan swasta menggunakan model sistem pelayaran, maha data pelayaran, dan analisis ilmu sosial dan kualitatif dari kebijakan dan struktur komersial sistem pelayaran. Kerja UMAS didukung data mutakhir yang didukung oleh model dan praktik penelitian yang ketat, yang menjadikan UMAS terdepan di dunia dalam tiga bidang utama; menggunakan maha data untuk memahami penggerak emisi pelayaran, menggunakan model untuk mengeksplorasi transisi pelayaran ke masa depan niremisi, dan memberikan interpretasi kepada pengambil keputusan utama.

Tentang Indonesia Ocean Justice Initiative

Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI) merupakan wadah pemikir independen dan kelompok advokasi kebijakan Indonesia yang bertujuan untuk mendukung Indonesia, sebagai salah satu negara maritim terbesar, dalam mewujudkan tata kelola laut yang berkelanjutan dan adil, dengan meningkatkan keamanan maritim, mempromosikan tata kelola laut yang berkelanjutan dan memastikan akses keadilan bagi orang-orang terpinggirkan yang bergantung pada laut.